

KAUSALITAS PAD DAN BELANJA MODAL TERHADAP DEFISIT APBD (STUDI KASUS PROVINSI 3 JAWA PERIODE 2012-2021)

Dendy Pramana Putra^{1*}, Lukman Efendi², Adiwidya Muhammad Sofwan³

Magister Ilmu Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta^{1, 2, 3}

^{*}243221003@student.upnyk.ac.id

ABSTRACT

This study aims to know the extent to which original local government revenue and capital expenditure are related to the local government budget deficit for the 2012-2021 period. Data used is panel data with 10 years series (2012-2021) and cross-section in 3 Java Provinces (West Java, Central Java, East Java). The method used a panel data regression Common Effects Model (CEM) with help from views 9.0 software. The result of this study showed the original local government revenue that has positive influence and significant on the local government budget deficit with tcalculated the value of original local government revenue is 4.968535 and Prob. 0.0000. Meanwhile, capital expenditures are influentially negative and significant to the local government budget deficit with tcalculated value of capital expenditure is -2.069669 and Prob is 0.0482. The original local government revenue and capital expenditures simultaneously influentially significant to the local government budget deficit with mark Prob (F-Statistic) of 0.000156. Original local government revenue and capital expenditure variables predicted the deficit of local government budget deficit in 43.9%. It means variation of this variable in determines local government budget deficit is strong sufficient.

Keywords: APBD Deficit, PAD, Capital Expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap defisit APBD Periode 2012-2021. Data yang digunakan adalah data panel dengan time series 10 tahun (2012-2021) dan cross section di Provinsi 3 Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur). Metode yang digunakan ialah metode regresi data panel menggunakan Common Effect Model (CEM) dengan bantuan software Eviews 9.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai thitung PAD sebesar 4,968535 dan nilai Prob. 0,0000. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai thitung Belanja modal sebesar -2,069669 dan nilai Prob. 0,0482. PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,000156. Variabel PAD dan Belanja Modal dapat memprediksi Defisit APBD sebesar 43,9% yang berarti variasi variabel ini dalam menentukan defisit APBD cukup kuat.

Kata kunci : Defisit APBD, PAD, Belanja Modal

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan regulasi yang berlaku. PAD dapat diperoleh dari sumber dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan guna menambah dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Defisit anggaran adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah syarat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Defisit anggaran dapat terjadi dalam suatu pengeluaran apabila pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya.

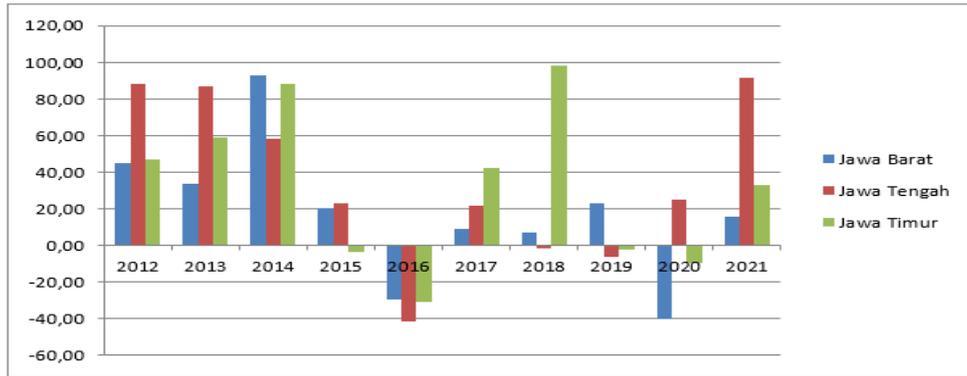
Defisit anggaran ini bisa ditutupi, salah satunya dengan cara utang luar negeri atau menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dari tahun atau periode sebelumnya. Defisit anggaran, selain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, pun dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan dan belanja. Jika ditilik dari tingkat provinsi, defisit anggaran dipengaruhi oleh PAD yang merupakan pendapatan dari masing-masing daerah itu sendiri. Selain itu, defisit anggaran pun dipengaruhi oleh belanja, salah satunya adalah belanja modal. (Rosadi & Dharma Suputra, 2017)

Terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh pemerataan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan belanja pengeluaran untuk keberlangsungan perekonomian. Minimnya daya beli masyarakat juga dapat memengaruhi defisit anggaran karena dapat memengaruhi penerimaan pajak dalam negeri. Belanja modal menjadi salah satu aset dan menjadi kebutuhan dalam perekonomian di beberapa provinsi.

Defisit anggaran juga dapat dipengaruhi oleh harga komponen yang ada dalam belanja modal. Misalnya permintaan pembuatan infrastruktur yang ada dalam komponen belanja modal yang tidak terprediksi. Notabene pembuatan infrastruktur publik seperti gedung-gedung, jembatan, maupun jalan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi. Karena apabila semakin sering pemerintah melakukan pembangunan jalan atau gedung, maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin tinggi (Kunarjo, 2001).

Pembangunan di bidang ekonomi harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan, agar daya beli masyarakat juga meningkat secara merata. Menurut Wardana, pertumbuhan ekonomi yang baik diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. (Wardana, 2016)

Penerimaan (*revenue*) pemerintah dan pengeluaran atau belanja pemerintah (*government spending*) saling memiliki hubungan terkait, sebab terkait dengan kebijakan penganggaran publik di mana dalam penganggaran, pemerintah memainkan perannya, seperti alokasi, distribusi, stabilisasi dan keberlanjutan. Kebijakan fiskal yang 'sehat' berperan penting dalam menjamin stabilitas harga dan kontinuitas agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia yang telah melaksanakan otonomi daerah, memahami kausalitas antara pendapatan dan belanja pemerintah sangat penting, terutama dari sisi kebijakan. (Prasetya, 2012)



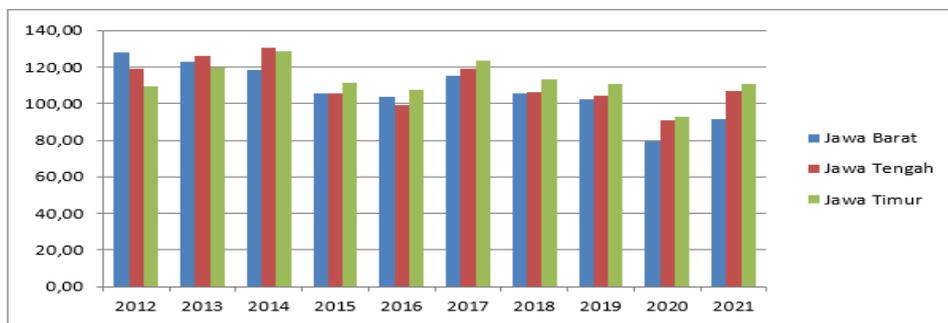
Gambar 1. Grafik Defisit APBD Provinsi 3 Jawa 2012-2021

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 1. Diketahui bahwa pada provinsi 3 Jawa pada tahun 2012-2014 terjadi defisit APBD, pada tahun 2015 di Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi defisit, namun di Jawa Timur justru terjadi surplus. Pada tahun 2016 provinsi 3 Jawa mengalami surplus, tahun berikutnya ketiganya mengalami defisit lagi. Pada tahun 2018 Jawa Barat dan Jawa Timur terjadi defisit, bahkan Jawa Timur defisitnya cukup tinggi dibandingkan Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah terjadi surplus. Tahun 2019 Jawa Barat mengalami defisit, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi surplus. Tahun 2020, Jawa Barat dan Jawa Timur terjadi surplus dan Jawa Tengah mengalami defisit. Pada tahun 2021, provinsi 3 Jawa mengalami defisit.

PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Apabila PAD suatu daerah mampu menyumbangkan kontribusi secara optimal dalam memasukan belanja daerah, maka dapat disebut bahwa daerah tersebut termasuk daerah yang cukup maju dari sektor ekonomi.

Hal ini diharapkan kedepannya, ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat hendaknya dapat di minimalisir guna meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Horota et al., n.d.)



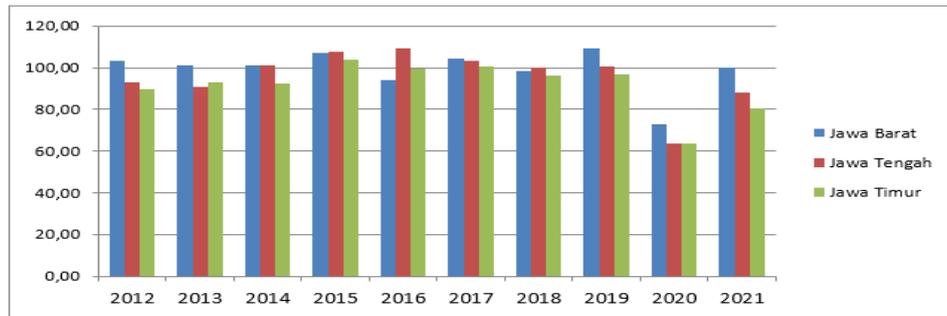
Gambar 2. Grafik PAD Provinsi 3 Jawa 2012-2021

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 2. terlihat bahwa PAD di provinsi 3 Jawa kondisi PAD cukup berfluktuatif. PAD tertinggi Jawa Barat pada tahun 2012 dengan nilai 128,35% dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 79,48%. PAD tertinggi Jawa Tengah berada di tahun 2014 dengan nilai 130,54% dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 90,89%. Sedangkan PAD tertinggi Jawa Timur terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 128,72% dan

terendah pada tahun 2020 dengan nilai 93,11%. PAD dari Provinsi 3 Jawa pada tahun 2020 menunjukkan tren terendah akibat pandemi global.

Belanja pengeluaran merupakan pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Pembelanjaan modal yang di sini dapat berupa pembelian tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Dalam hal ini, agar tidak terjadi defisit anggaran, maka pengeluaran pemerintah dalam pemenuhan belanja modal harus seimbang atau terpenuhi.



Gambar 3. Grafik Belanja Modal Provinsi 3 Jawa 2012-2021

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Diolah oleh peneliti)

Pada Gambar 3. diketahui bahwa belanja modal di provinsi 3 Jawa juga mengalami fluktuatif. Belanja modal di Jawa Barat tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 109,55% dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 73,16%. Belanja modal tertinggi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 107,64% dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 63,46%. Sedangkan belanja modal tertinggi Jawa Timur terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 103,99% dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 63,75% yang hampir sama dengan Jawa Tengah. Belanja modal pada tahun 2020, provinsi 3 Jawa ini mengalami penurunan akibat pandemi global.

Provinsi 3 Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) termasuk provinsi yang padat penduduk sehingga sangat memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang peningkatan sarana prasarana bagi masyarakatnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut belanja modal pemerintah juga akan meningkat. Adanya pembangunan tersebut juga memungkinkan adanya peningkatan PAD.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai PAD dan belanja modal di tiga provinsi tersebut yang dikaitkan dengan defisit APBD. Adapun rumusan masalah yang dipilih adalah bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan PAD dan belanja modal terhadap defisit APBD. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kausalitas PAD dan Belanja Modal Terhadap Defisit APBD (Studi Kasus Provinsi 3 Jawa Periode 2012-2021)”.

2. LANDASAN TEORI

Defisit Anggaran

Anggaran negara terdiri dari total pengeluaran dan pendapatan pemerintah itu sendiri. Dalam kondisi ekonomi tertentu, salah satu pedoman yang diterapkan oleh pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diberlakukan dapat dilihat dalam anggaran pemerintah tersebut. Sedangkan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan fiskal ekspansif.

Anggaran pemerintah secara umum memiliki sifat sistemis dan *cyclical*. Anggaran memiliki sifat sistemis atau aktif, yang dapat dipahami bahwa anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan beban seperti penetapan besaran pajak, jaminan sosial, dan belanja pemerintah untuk menghitung jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta kemungkinan defisit atau surplus jika perekonomian beroperasi pada tingkat produksi potensial.

Namun, sebagian besar dari anggaran bersifat *cyclical* atau pasif, di mana ditentukan oleh kondisi siklus ekonomi. Untuk mengetahui dampak dari siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengetahui perubahan dalam pendapatan, pengeluaran, dan defisit atau surplus yang timbul karena perekonomian yang tidak berjalan pada keluaran potensialnya. Anggaran yang bersifat *cyclical* ini merupakan pengurangan antara anggaran aktual dan anggaran *structural*. (Basri & S, 2019)

Penyebab Defisit Anggaran

Menurut Rahardja (2008), defisit anggaran pemerintah dapat disebabkan berbagai hal, seperti sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak *ter-cover*, biasanya negara akan memilih utang ke luar negeri, tujuannya untuk menghindari pembebanan kepada warga negara jika kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak.
- b. Minimnya daya beli masyarakat
Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal memiliki daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan harganya sangat tinggi, hal ini dikarenakan sebagian produksinya ada komponen dari hasil impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut.
- c. Pemerataan pendapatan masyarakat
Pengeluaran tambahan juga diperlukan untuk menunjang pemerataan pendapatan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah juga perlu melakukan pemerataan pendapatan.
- d. Melemahnya nilai tukar
Indonesia sejak tahun 1969 melakukan utang ke luar negeri dan mengalami masalah apabila ada fluktuasi nilai tukar setiap tahunnya.
- e. Pengeluaran karena inflasi, penyusunan anggaran negara setiap awal tahun, merujuk pada standar harga yang telah ditetapkan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif. APBD biasanya dinyatakan dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah. Pada hakikatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Penyusunan APBD digunakan sebagai pedoman penerimaan

dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2012)

Teori Klasik

Teori klasik atau aliran pemikiran klasik beranggapan bahwa kenaikan pembiayaan defisit anggaran atau pengurangan pajak akan memengaruhi peningkatan *disposable income* (pendapatan yang siap dibelanjakan). Naiknya *disposable income* dapat berakibat meningkatkan belanja barang dan jasa masyarakat. Peningkatan kekayaan yang positif berpengaruh terhadap penambahan permintaan secara agregat.

Dalam jangka pendek, kenaikan pinjaman di pasar modal oleh pemerintah hanya bersifat kompensasi parsial terhadap tambahan tabungan. Kenaikan suku bunga dibutuhkan untuk memulihkan keseimbangan yang disebabkan oleh peningkatan tabungan dan penurunan konsumsi dan permintaan investasi. Dalam jangka panjang, turunnya investasi akan menyebabkan stok modal menjadi kecil, dan akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. (Bahtiar, 2015)

Teori Keynesian

Keynesian beranggapan bahwa kenaikan permintaan agregat akan memengaruhi akumulasi modal dan keluaran agregat. *Tax cut* menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Hal ini disebabkan oleh *sticky wages*, *sticky prices* atau kesalahan persepsi temporer. Perubahan permintaan agregat akan memengaruhi pemanfaatan (*utilization*) faktor produksi. Keynesian berpendapat bahwa kebijakan defisit anggaran akan memengaruhi pendapatan nasional, hanya melalui perubahan penawaran faktor produksi. (Waluyo, 2006)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki andil besar dalam Pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

PAD merupakan faktor krusial pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD, berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah daerah. (Waluyo, 2006)

Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur keberlangsungan perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan pendapatan pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuannya tak lain untuk kestabilan harga, tingkat *output* dan kesempatan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2012)

Menurut Sukirno (2012), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah memberlakukan suatu kebijakan untuk membeli barang

dan jasa, maka pengeluaran pemerintah menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengindahkan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat konsumsi, misalnya untuk membangun infrastruktur.

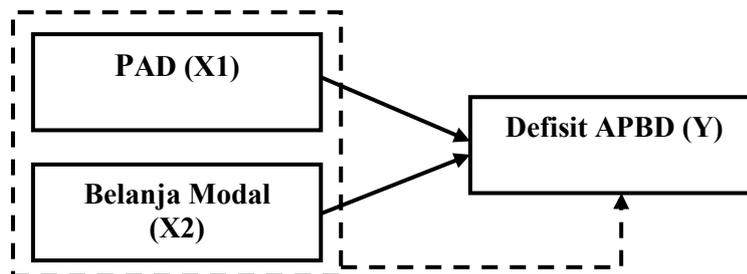
Konsumsi pemerintah dapat diuraikan sebagai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Di mana pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja dan berbagai macam subsidi. (Boediono, 2011)

Keterkaitan antara PAD, Defisit Anggaran, dan Belanja Modal

Dengan PAD yang kuat maka akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, jika fiskal daerah meningkat, maka dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga menghindari defisit. Defisit anggaran dapat dibenarkan jika digunakan untuk belanja modal produktif sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi dan PAD di masa depan. Belanja modal oleh pemerintah harus berbasis perencanaan yang efisien agar tidak menyebabkan pemborosan fiskal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (Musgrave, 1989)

3. MODEL PENELITIAN

Kerangka konseptual berdasarkan latar belakang, peneliti sajikan dalam bentuk bagan seperti pada gambar di bawah ini:

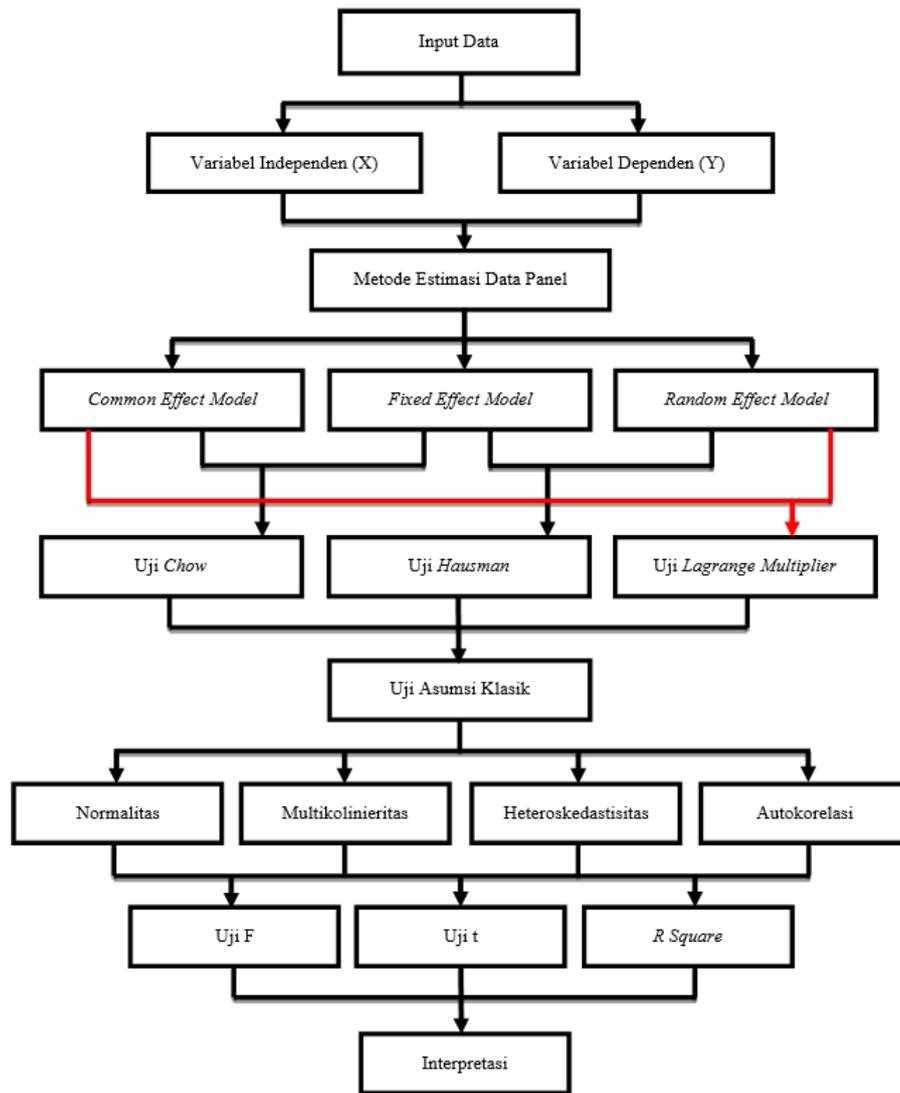


Gambar 4. Model Penelitian

4. METODE PENELITIAN

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan *Common Effect Model (CEM)* sebagai model analisisnya. Analisis data menggunakan *software Eviews 9.0*. Jumlah *observations* dalam penelitian ini sebanyak 30, yang terdiri dari data *cross section* yaitu Provinsi 3 Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), dan data *time series* yaitu 10 tahun (2012-2021). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari situs *web* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (djpk.kemenkeu.go.id).



Gambar 5. Bagan Alur Pengujian Regresi Data Panel

Metode Estimasi Data Panel

Pendekatan yang dilakukan dalam analisis regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed effect Model* (FEM), *random effect model* (REM). Persamaan CEM/FEM/REM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Defisit APBD
- α : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien Regresi
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 : Belanja Modal
- ε : Standar Error

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk membandingkan model yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai *cross section* F lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah CEM, namun jika nilai *cross section* F lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM.

Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk membandingkan model yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM atau *Random Effect Model* (REM). Jika nilai *cross section* F lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah REM, namun jika nilai *cross section* F lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM.

Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan model yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM atau REM. Jika nilai *cross section* F lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah CEM, namun jika nilai *cross section* F lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih adalah REM. (Sriyana, 2014)

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghindari penyimpangan asumsi klasik agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaan analisis regresi linier berganda, agar model dapat dianalisis dan memberikan hasil yang representatif, maka model harus memenuhi pengujian asumsi klasik yakni dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Signifikansi

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, maka PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Defisit APBD.

$H_a : \beta \neq 0$, maka PAD dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Defisit APBD.

Kriteria pengujian:

$P_{value} (sig) < 0,05 = H_a$ diterima

$P_{value} (sig) > 0,05 = H_0$ ditolak

Penolakan hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5% dengan kriteria:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya X berpengaruh terhadap Y. Tingkat signifikansinya α sama dengan 5%. Jika nilai *Prob.* lebih besar dari α maka tidak signifikan, sedangkan jika nilai *Prob.* lebih kecil dari α maka signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika R^2 sebesar 1 berarti kecocokan sempurna atau variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memperkirakan variasi variabel terikat. Jika R^2 sebesar 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara Y dan X atau kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. (Mulyono, 2006)

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 : Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	28,15300	110,3373	95,48600
Median	22,96000	110,1050	99,55000
Maximum	98,54000	130,5400	109,5500
Minimum	-41,78000	79,48000	63,46000
Std. Dev.	41,32156	12,22979	11,82338
Skewness	0,162138	-0,384131	-1,445884
Kurtosis	2,120357	2,897200	4,586473
Jarque-Bera	1,098658	0,750992	13,59902
Probability	0,577337	0,686949	0,001114
Sum	844,5900	3310,120	2864,580
Sum Sq. Dev.	49516,66	4337,464	4053,976
Observations	30	30	30

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Model Estimasi Data Panel

Common Effect Model (CEM)

Tabel 2 : Hasil Uji CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-149,3559	58,92292	-2,534768	0,0174
X1	2,565345	0,516318	4,968535	0,0000
X2	-1,105339	0,534066	-2,069669	0,0482
R-squared	0,477620	Mean dependent var		28,15300
Adjusted R-squared	0,438925	S.D. dependent var		41,32156
S.E. of regression	30,95188	Akaike info criterion		9,797384
Sum squared resid	25866,51	Schwarz criterion		9,937504
Log likelihood	-143,9608	Hannan-Quinn criter.		9,842209
F-statistic	12,34326	Durbin-Watson stat		1,781038
Prob(F-statistic)	0,000156			

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Fixed Effect Model (FEM)**Tabel 3 : Hasil Uji FEM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-147,7707	60,28569	-2,451174	0,0216
X1	2,675278	0,561368	4,765638	0,0001
X2	-1,248972	0,592378	-2,108404	0,0452
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,494134	Mean dependent var		28,15300
Adjusted R-squared	0,413196	S.D. dependent var		41,32156
S.E. of regression	31,65362	Akaike info criterion		9,898594
Sum squared resid	25048,79	Schwarz criterion		10,13213
Log likelihood	-143,4789	Hannan-Quinn criter.		9,973303
F-statistic	6,105052	Durbin-Watson stat		1,869728
Prob(F-statistic)	0,001433			

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Random Effect Model (REM)**Tabel 4 : Hasil Uji REM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-149,3559	60,25882	-2,478574	0,0197
X1	2,565345	0,528024	4,858386	0,0000
X2	-1,105339	0,546174	-2,023785	0,0530
Effects Specification				
		S.D.		Rho
Cross-section random		5,59E-05		0,0000
Idiosyncratic random		31,65362		1,0000
Weighted Statistics				
R-squared	0,477620	Mean dependent var		28,15300
Adjusted R-squared	0,438925	S.D. dependent var		41,32156
S.E. of regression	30,95188	Sum squared resid		25866,51
F-statistic	12,34326	Durbin-Watson stat		1,781038
Prob(F-statistic)	0,000156			
Unweighted Statistics				
R-squared	0,477620	Mean dependent var		28,15300
Sum squared resid	25866,51	Durbin-Watson stat		1,781038

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pemilihan Model**Uji Chow****Tabel 5 : Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,408062	(2,25)	0,6693
Cross-section Chi-square	0,963702	2	0,6176

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diketahui nilai *Statistic Cross-section Chi-square* sebesar 0,963702 dengan nilai *Probability* 0,6176. Hal tersebut berarti lebih dari 0,05 ($0,6176 > 0,05$) maka secara statistik H_0 diterima dan menolak H_1 . Sehingga dalam uji *Chow* ini, model yang terpilih adalah *Common Effect Model (CEM)*.

Uji Hausman

Tabel 6 : Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,816124	2	0,6649

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diketahui nilai *Cross-section random* sebesar 0,816124 dengan nilai *Probability* 0,6649. Hal tersebut berarti lebih dari 0,05 ($0,6649 > 0,05$) maka secara statistik H_0 diterima dan menolak H_1 . Sehingga dalam uji *Hausman* ini, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 7 : Hasil Uji Lagrange Multiplier

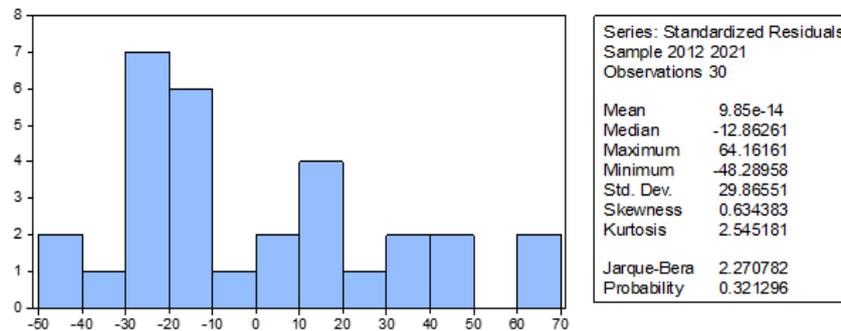
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0,839372 (0,3596)	0,295305 (0,5868)	1,134677 (0,2868)

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diketahui nilai *both* sebesar 0,2868. Hal tersebut berarti lebih dari 0,05 ($0,2868 > 0,05$) maka secara statistik H_0 diterima dan menolak H_1 . Sehingga dalam uji *Lagrange Multiplier* ini, model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Normalitas



Gambar 6. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai *probability* sebesar 0,321296 yang berarti $0,321296 > 0,05$. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Multikolinieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1,000000	0,414101
X2	0,414101	1,000000

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua data kurang dari 0,80 ($<0,80$). Jika nilai korelasinya di atas 0,80 maka terjadi multikolinieritas, begitu pun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Heteroskedastisitas

Tabel 9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29,53115	30,55988	0,966337	0,3425
X1	-0,247060	0,267784	-0,922608	0,3644
X2	0,237119	0,276989	0,856062	0,3995

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Apabila *output* mempunyai nilai probabilitas *Chi-square* yang signifikan (nilai $p=0,0000$), maka terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai $p > 0,0000$ maka tidak terjadi heteroskedastiditas. Berdasarkan tabel di atas hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai *Prob.* dari kedua variabel X lebih dari 0,05. Maka dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan. Pengujian autokorelasi pada data yang bukan *time series*, baik data *cross section* maupun data panel hanya akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. (Basuki, 2017)

Uji Signifikansi

Berdasarkan hasil uji *Chow*, *Hausman*, *Lagrange Multiplier*, model yang terpilih adalah CEM. Sehingga, selanjutnya dilakukan uji signifikansi menggunakan model CEM.

Common Effect Model (CEM)

Tabel 10 : Hasil Uji Signifikansi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-149,3559	58,92292	-2,534768	0,0174
X1	2,565345	0,516318	4,968535	0,0000
X2	-1,105339	0,534066	-2,069669	0,0482
R-squared	0,477620	Mean dependent var		28,15300
Adjusted R-squared	0,438925	S.D. dependent var		41,32156
S.E. of regression	30,95188	Akaike info criterion		9,797384
Sum squared resid	25866,51	Schwarz criterion		9,937504
Log likelihood	-143,9608	Hannan-Quinn criter.		9,842209
F-statistic	12,34326	Durbin-Watson stat		1,781038
Prob(F-statistic)	0,000156			

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Defisit APBD} = -149,3559 + 2,565345\text{PAD} - 1,105339\text{Belanja Modal} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan nilai konstanta bernilai negatif 149,3559. Koefisien regresi variabel PAD bernilai positif 2,565345 dan koefisien Belanja Modal bernilai negatif 1,105339.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Prob (F-Statistic)* sebesar 0,000156. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi ($< 0,05$). Jadi PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Defisit APBD.

Dapat disimpulkan bahwa jika PAD dan Belanja Modal meningkat maka akan berpotensi menurunkan Defisit APBD dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika PAD dan Belanja Modal menurun, maka dalam jangka panjang akan meningkatkan Defisit APBD.

Uji Parsial (Uji t)

Nilai t_{tabel} sebesar 1,70329 diperoleh dari $k = 3$ (jumlah variabel), $n = 30$ (jumlah *observations*), $df = n - k = 27$. Berdasarkan titik persentase distribusi t dengan tingkat signifikansi 5% maka dihasilkan nilai t_{tabel} sebesar 1,70329.

Variabel PAD (X1)

Berdasarkan *output* CEM diketahui nilai t_{hitung} PAD sebesar 4,968535 yang berarti lebih besar dari t_{tabel} ($4,968535 > 1,70329$) dengan nilai *Prob.* 0,0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0000 < 0,05$). Maka dapat dinyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Defisit APBD. Sedangkan nilai koefisien regresi dari PAD bernilai 2,565345 artinya jika PAD meningkat 1% maka Defisit APBD akan bertambah sebesar 2,565345 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Semakin tinggi PAD, maka semakin kecil kemungkinan terjadi Defisit APBD, karena daerah mampu membiayai belanjanya tanpa bergantung pada transfer pusat atau utang. Jika PAD rendah, sementara belanja tetap tinggi, maka potensi defisit meningkat. PAD yang tinggi mengindikasikan kemampuan daerah untuk membiayai belanja tanpa ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.

Variabel Belanja Modal (X2)

Berdasarkan *output* CEM diketahui nilai t_{hitung} Belanja modal sebesar -2,069669 yang berarti lebih besar dari t_{tabel} ($2,069669 > 1,70329$) dengan nilai *Prob.* 0,0482 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0482 < 0,05$). Maka dapat dinyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Defisit APBD. Sedangkan nilai koefisien regresi dari Belanja Modal bernilai -1.105339 artinya jika Belanja Modal meningkat 1% maka Defisit APBD akan turun sebesar 1.105339 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Kenaikan Belanja Modal bisa meningkatkan risiko Defisit APBD jika tidak diimbangi oleh kenaikan PAD atau sumber pendanaan lain. Namun, Belanja Modal bisa berdampak positif jangka panjang karena dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah ke depannya.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji CEM dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.438925 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 43,9% sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model. Artinya variabel PAD dan Belanja Modal sebesar 43,9% dapat memprediksi Defisit APBD, sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Faktor lain (56,1%) yang memengaruhi Defisit APBD adalah pendapatan pemerintah seperti transfer pemerintah pusat yang meliputi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, keterlambatan atau penurunan transfer dari pusat akan memperburuk keseimbangan anggaran. Terjadinya fluktuasi ekonomi seperti krisis ekonomi dapat

menurunkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Perlambatan ekonomi juga mengurangi konsumsi dan produksi, berdampak pada penerimaan pajak.

Selain belanja modal, defisit APBD juga bisa disebabkan karena belanja pegawai (beban gaji), subsidi dan belanja sosial yang jika dalam kondisi krisis, pemerintah biasanya meningkatkan belanja sosial dan subsidi, yang memperbesar defisit, serta proyek *multiyears* yang jika tidak diatur dengan cermat, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan.

Faktor lain seperti ketidakstabilan politik bisa mengganggu perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Nilai tukar rupiah yang lemah atau inflasi tinggi juga bisa meningkatkan belanja pemerintah (terutama barang impor) dan memperbesar defisit.

6. KESIMPULAN

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai t_{hitung} PAD sebesar 4,968535 dan nilai *Prob.* 0,0000. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai t_{hitung} Belanja modal sebesar -2,069669 dan nilai *Prob.* 0,0482. PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Defisit APBD dengan nilai *Prob (F-Statistic)* sebesar 0,000156. Variabel PAD dan Belanja Modal dapat memprediksi Defisit APBD sebesar 43,9% yang berarti variasi variabel ini dalam menentukan defisit APBD cukup kuat.

PAD berfungsi sebagai penyangga terhadap defisit. Optimalisasi PAD perlu dilakukan untuk mengurangi defisit dan meningkatkan kemampuan belanja modal. Belanja modal harus direncanakan dengan cermat, agar tidak membebani APBD secara jangka pendek. Alokasi belanja modal juga harus selektif dan diarahkan pada sektor yang memiliki *multiplier effect* tinggi. Kombinasi ideal seperti PAD yang kuat dengan Belanja Modal produktif, maka defisit bisa dikendalikan bahkan dikurangi. Pengelolaan defisit harus diarahkan pada pembiayaan yang produktif dan efisien, bukan sekadar konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Y. (2015). *Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Swasta (Pendekatan Keynesian dan Neoklasik) Studi Kasus Perekonomian Indonesia periode 1990-2013*. Universitas Diponegoro.
- Basri, Y. Z., & S, M. (2019). STRATEGI DAN PROSES PENGURANGAN DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.25105/jipak.v1i1.4415>
- Basuki, A. T., & P. N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Rajagrafindo Persada.
- Boediono. (2011). *Ekonomi Makro*. BPFE-Yogyakarta.
- Horota, P., Ayu, I., Riani, P., & Marbun, R. M. (n.d.). PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA. *Jurnal Keuda*, 2(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>.
- Kunarjo. (2001). *Defisit Anggaran Negara*.
- Mulyono, S. (2006). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

- Musgrave, R. A., & M. P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian VI: Analisis Biaya dan Manfaat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Rosadi, A. I., & Dharma Suputra, I. D. G. (2017). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, DANA ALOKASI UMUM DAN SILPA PADA ALOKASI BELANJA MODAL. 19 (2). E-Jurnal Akuntansi. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/26706>.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekosinia.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, J. (2006). PENGARUH PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: SUATU SIMULASI MODEL EKONOMI MAKRO INDONESIA 1970 – 2003. *Kinerja*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v10i1.915>.
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 179–191. <https://doi.org/10.30872/jinv.v12i2.804>.